

Nama : Lusi Yana Agustina
NPM : 2313031069
Kelas : 2023C
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

SOAL KASUS

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi *Nusantara Raya* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah yang memiliki kelebihan guru di kota, namun kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan Merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem *penganggaran berbasis kinerja*
- Mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

TUGAS ANDA

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

1) Analisis Struktur Pengeluaran

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Jawaban:

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum efisien jika dilihat dari hubungan antara besarnya anggaran dan hasil pendidikan yang dicapai. Meskipun pemerintah daerah sudah mengalokasikan 22% APBD untuk pendidikan, hasilnya belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari rendahnya skor literasi dan numerasi siswa, ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa yang masih tinggi, serta keterbatasan infrastruktur digital di banyak sekolah.

Masalah utama terletak pada struktur pengeluaran yang terlalu berat pada belanja rutin, khususnya gaji dan tunjangan guru yang mencapai 68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran hanya digunakan untuk mempertahankan sistem yang ada (maintenance), bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (development). Dalam ekonomi pendidikan, kondisi ini menunjukkan inefisiensi alokatif, yaitu ketika sumber daya tidak dialokasikan ke sektor yang paling berdampak terhadap hasil belajar siswa.

Selain itu, distribusi guru yang tidak merata juga membuat belanja gaji tidak menghasilkan output yang optimal. Banyak guru terkonsentrasi di kota, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar. Akibatnya, meskipun secara nominal anggaran besar, secara kualitas hasil pendidikan masih rendah.

- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Jawaban:

Beberapa bagian anggaran perlu direalokasi agar lebih efisien dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Pertama, belanja gaji dan tunjangan guru (68%) perlu direstrukturisasi, bukan dalam arti dipotong besar, tetapi dioptimalkan melalui redistribusi guru dan sistem berbasis kinerja. Artinya, tidak semua kenaikan anggaran harus berbasis jumlah pegawai, tetapi juga harus mempertimbangkan kontribusi terhadap hasil belajar siswa. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil juga perlu diberikan insentif yang lebih besar agar distribusi lebih merata.

Kedua, belanja administrasi (12%) tergolong cukup tinggi dan masih bisa dikurangi sekitar 2–4% melalui digitalisasi sistem birokrasi pendidikan. Banyak proses administratif seperti pelaporan, absensi, dan pendataan yang masih manual sehingga tidak efisien. Dengan digitalisasi, anggaran ini dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

Ketiga, infrastruktur pendidikan (12%) perlu ditingkatkan secara signifikan menjadi sekitar 18–20%, terutama untuk infrastruktur digital seperti internet sekolah, perangkat komputer, dan platform pembelajaran. Hal ini penting karena keterbatasan teknologi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil.

Keempat, program bantuan siswa (8%) perlu ditingkatkan menjadi sekitar 12–15% untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Bantuan ini penting untuk mengurangi dampak kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tinggi di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, realokasi ini bertujuan menggeser pola belanja dari yang bersifat rutin menjadi lebih produktif, sesuai dengan prinsip equity (keadilan) dan efficiency (efisiensi) dalam ekonomi pendidikan, serta sejalan dengan praktik negara OECD.

2) Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Jawaban:

Ya, pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih sangat bergantung pada pemerintah daerah melalui APBD. Ketergantungan ini terlihat dari tidak adanya sumber pendanaan signifikan selain anggaran pemerintah daerah itu sendiri.

Kondisi ini memiliki beberapa dampak. Pertama, sistem pendidikan menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi kondisi fiskal daerah. Jika pendapatan daerah menurun, maka program pendidikan, terutama yang bersifat pengembangan, akan langsung terdampak. Kedua, ruang inovasi menjadi terbatas karena sebagian besar anggaran sudah habis untuk belanja rutin seperti gaji guru. Ketiga, ketergantungan tunggal ini membuat sistem pembiayaan kurang fleksibel dalam menghadapi tantangan pendidikan modern seperti digitalisasi dan peningkatan kualitas pembelajaran

- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? jelaskan model yang tepat.

Jawaban:

Menurut saya, sangat perlu melibatkan sektor swasta dan skema pembiayaan alternatif untuk memperkuat sistem pembiayaan pendidikan agar lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada APBD.

Model yang paling tepat adalah Public Private Partnership (PPP), yaitu kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan pendidikan. Dalam konteks ini, sektor swasta dapat membantu pembangunan infrastruktur seperti jaringan internet sekolah, laboratorium komputer, serta platform pembelajaran digital. Pemerintah tetap menjadi pengendali utama kebijakan, sedangkan swasta berperan dalam efisiensi dan inovasi teknologi.

Selain PPP, skema Corporate Social Responsibility (CSR) juga sangat relevan. CSR dapat diarahkan untuk program beasiswa siswa miskin, penyediaan perangkat digital seperti laptop atau tablet, serta pelatihan keterampilan guru dan siswa. Hal ini sangat penting terutama untuk daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Selain itu, perlu juga dikembangkan Dana Abadi Pendidikan Daerah, yaitu dana investasi jangka panjang yang hasil pengembangannya digunakan untuk mendanai pendidikan secara berkelanjutan. Model ini penting untuk menjaga stabilitas pembiayaan pendidikan dalam jangka panjang tanpa terlalu bergantung pada APBD tahunan.

3) Dibandingkan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diterima?

Jawaban:

Beberapa elemen dari praktik negara OECD yang realistis untuk diterapkan di Provinsi Nusantara Raya adalah sebagai berikut.

Pertama, performance-based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja, yaitu sistem di mana alokasi dana pendidikan tidak hanya berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi juga berdasarkan hasil capaian siswa seperti literasi dan numerasi. Sistem ini mendorong sekolah untuk lebih fokus pada kualitas hasil pembelajaran.

Kedua, needs-based funding atau pendanaan berbasis kebutuhan siswa. Dalam sistem ini, sekolah di daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan mendapatkan alokasi dana lebih besar dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan pendidikan.

Ketiga, fokus pada peningkatan kualitas guru sebagai pusat reformasi pendidikan. Di negara OECD, guru dianggap sebagai faktor utama kualitas pendidikan, sehingga dilakukan pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja rutin, dan sistem insentif berbasis hasil.

Keempat, penggunaan data-driven policy atau kebijakan berbasis data. Semua keputusan pendidikan didasarkan pada data yang akurat seperti hasil ujian, tingkat kehadiran, kondisi sekolah, dan efektivitas penggunaan anggaran.

- Apa tantangan penerapannya di konteks Indonesia?

Jawaban:

Tantangan utama penerapan model OECD di Indonesia, khususnya di Nusantara Raya, cukup kompleks.

Pertama, keterbatasan data pendidikan yang belum lengkap, tidak seragam, dan belum terintegrasi antar wilayah, sehingga menyulitkan penerapan sistem berbasis data secara akurat.

Kedua, ketimpangan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, membuat implementasi sistem berbasis teknologi menjadi tidak merata.

Ketiga, perbedaan kapasitas manajemen pendidikan antar daerah, di mana tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang siap mengelola sistem berbasis kinerja.

Keempat, adanya resistensi birokrasi terhadap perubahan sistem dari input-based budgeting ke performance-based budgeting karena perubahan ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Kelima, kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam juga menjadi tantangan dalam pemerataan kebijakan pendidikan.

4) Rancangan Reformasi

Susun usulan reformasi singkat pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan Provinsi Nusantara Raya

Reformasi ini disusun untuk memperbaiki efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas antarwilayah, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Fokus utama reformasi adalah meningkatkan literasi dan numerasi siswa secara signifikan dalam lima tahun melalui perbaikan sistem pembiayaan dan tata kelola pendidikan.

- **Perubahan Struktur Belanja**

Dalam lima tahun ke depan, struktur anggaran pendidikan yang saat ini sebesar 22% dari APBD akan dialihkan secara bertahap agar lebih berorientasi pada hasil. Pada tahap awal (tahun 1–2), porsi belanja gaji dan tunjangan guru yang saat ini 68% akan dikurangi secara bertahap menjadi sekitar 62% dengan cara memperbaiki distribusi guru dan mengurangi penumpukan tenaga pendidik di wilayah perkotaan.

Pada saat yang sama, anggaran infrastruktur pendidikan akan ditingkatkan dari 12% menjadi sekitar 18% untuk memperkuat fasilitas sekolah, terutama infrastruktur digital. Program bantuan siswa juga dinaikkan dari 8% menjadi 13% untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal. Sementara

itu, belanja administrasi yang saat ini 12% akan ditekan menjadi sekitar 7–8% melalui digitalisasi sistem birokrasi pendidikan.

Pada akhir periode lima tahun, ditargetkan struktur anggaran menjadi lebih seimbang, yaitu sekitar 55–60% untuk gaji dan pengembangan guru, 18–20% untuk infrastruktur, 13–15% untuk bantuan siswa, dan sisanya untuk administrasi yang lebih efisien.

- **Strategi Peningkatan Kualitas Guru**

Peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama dalam reformasi ini. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan kompetensi dan distribusi guru untuk mengatasi ketimpangan antara kota dan desa. Guru yang berlebih di kota akan didorong untuk rotasi ke daerah yang kekurangan tenaga pengajar dengan sistem insentif tambahan. Selain itu, pelatihan rutin akan dilakukan setiap tahun yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Sistem sertifikasi guru juga akan diperkuat dengan pendekatan berbasis kinerja, bukan hanya administratif. Guru dengan hasil kinerja baik akan mendapatkan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan.

- **Digitalisasi Sekolah**

Digitalisasi dilakukan secara bertahap untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Seluruh sekolah ditargetkan memiliki akses internet yang memadai dalam lima tahun, dimulai dari wilayah perkotaan dan kemudian diperluas ke daerah terpencil. Pemerintah juga akan menyediakan perangkat pembelajaran digital seperti komputer dan media pembelajaran interaktif untuk sekolah yang membutuhkan. Selain itu, akan dikembangkan sistem pembelajaran berbasis platform digital yang mencakup absensi, nilai, materi ajar, dan evaluasi siswa secara terintegrasi. Kerja sama dengan sektor swasta melalui CSR akan dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan konten pembelajaran digital, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih fleksibel melalui metode blended learning.

- **Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Sistem monitoring dan evaluasi akan diperkuat dengan penggunaan data sebagai dasar utama pengambilan kebijakan. Pemerintah daerah akan membangun sistem dashboard pendidikan yang dapat memantau indikator penting seperti hasil belajar siswa, distribusi guru, kondisi sekolah, serta penggunaan anggaran secara real time.

Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai efektivitas program dan menjadi dasar perbaikan kebijakan berikutnya. Selain itu, audit independen akan dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Hasil evaluasi juga akan digunakan untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya, sehingga sistem menjadi lebih berbasis kinerja dan kebutuhan nyata di lapangan.